



PEMKOT YOGYA SERAHKAN LKPD 2024 KE BPK

Disampaikan Awal Waktu, Siap Pertahankan Opini WTP

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali mampu menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY pada awal waktu. Penyampaian yang jauh sebelum batas terakhir tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

LKPD unaudited tahun anggaran 2024 Pemkot Yogya diserahkan oleh Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto kepada Kepala Perwakilan BPK DIY Agustin Sugihartatik. Momen itu bersamaan dengan penyerahan LKPD unaudited Pemda DIY, Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Bantul. Batas akhir penyampaian LKPD oleh masing-masing pemda ialah akhir Maret. "Yang pasti ini merupakan satu kewajiban dari Pemkot Yogya untuk menyerahkan LKPD. Sudah menjadi kewajiban rutin setiap tahun," jelas Sugeng di sela penyampaian LKPD 2024, Senin (17/2).

Dirinya menegaskan penyerahan LKPD sebelum batas waktu itu bagian dari komitmen dan ketugasan Pemkot Yogya. Menurutnya hal itu tidak lepas dari peran serta aktif para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Yogya. Sugeng menyatakan setelah LKPD diserahkan, akan di-

lakukan pemeriksaan oleh BPK. Untuk itu Pemkot Yogya siap menjalani pemeriksaan terperinci terhadap LKPD 2024. "Kami selalu berharap WTP kami sudah baik selama ini. Harapan kami nanti untuk pelaksanaan kinerja 2024 betul-betul tidak ada permasalahan yang berarti sehingga WTP juga masih bisa kami peroleh," tuturnya.

Selain itu pihaknya juga telah mengikuti entry meeting pemeriksaan interim atau pendahuluan atas LKPD tahun 2024 yang dilakukan BPK RI Perwakilan DIY pada awal Februari 2025. Sejauh ini LKPD Pemkot Yogya telah meraih predikat opini WTP ke-15 kali secara berturut-turut. Hal itu menunjukkan kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas dan transparansi Pemkot Yogya dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBD. "Insya Allah tidak ada permasalahan yang berarti sehing-

ga ke depan Pemkot Yogya khususnya bisa melakukan kinerja yang lebih baik di bawah walikota dan wakil walikota definitif," tambah Sugeng.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK DIY Agustin Sugihartatik, mengatakan sesuai aturan tentang pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah, LKPD yang telah direview Inspektorat disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pihaknya mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di wilayah DIY yang menyampaikan LKPD sebelum jangka waktu itu. "Pemeriksaan atas LKPD ini merupakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK dengan tujuan memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan," terangnya.

Selain memuat opini, pemeriksaan atas LKPD juga akan menghasilkan temuan yang signifikan dan material. Terhadap temuan itu BPK akan memberikan rekomendasi yang merupakan saran atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan sistem atau proses dalam organisasi atas permasalahan-permasalahan yang timbul. Adapun laporan hasil pemeriksaan LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPD.

Sedangkan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mewakili kepala daerah yang hadir menyampaikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan publik. Diharapkan laporan keuangan ini juga menjadi daya dorong dalam upaya mengantarkan DIY meraih WTP.

"Ke depan seiring tantangan yang semakin kompleks kita perlu memperkuat kolaborasi agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas. Mari terus melangkah maju membangun pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," pesannya. (Dhi)-d



KR-Istimewa

Pj Walikota Yogya Sugeng Purwanto menyampaikan dokumen LKPD tahun anggaran 2024 ke BPK RI Perwakilan DIY.